**DISFUNGSI WEF DALAM *GLOBAL GENDER GAP INDEX REPORT*
TERHADAP PELAKSANAAN KESETARAAN GENDER DI
AFGHANISTAN TAHUN 2021 – 2023**

Oleh : Tessa Alfiani Putri

Pembimbing: Indra Pahlawan, S.IP., M.Si

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

In 2021-2023, WEF declared Afghanistan as the country with the worst gender equality with an index that always decreases from year to year in the Global Gender Gap Index Report. Afghanistan is the country that always ranks at the bottom of the overall gender equality index and also ranks at the bottom in the fundamental components, economic participation and opportunity and educational achievement. These results are a result of the Taliban's increasing rule over Afghanistan in every aspect of society, especially education and the economy, which has resulted in the disenfranchisement of women in the country. The rules set affect the number of women participating in education and the economy. Afghanistan, which always ranks at the bottom, even the index obtained in gender equality always decreases, illustrates that the objectives of the Global Gender Gap Index Report are not achieved in the country.

In this study, to provide more specific accuracy to the results, the authors used qualitative research methodology through explanatory means. Data collection was conducted through primary and secondary sources. Primary sources are obtained from reports downloaded from the official WEF website and secondary data are obtained through books, journals, news, and data listed on various related official websites. The author uses a constructivist perspective with an international system level of analysis. The author analyzes the research results using Barnett and Finnemore's theory of international organizational dysfunction to explain the reasons for the failure to achieve WEF's goals in the Global Gender Gap Index Report in Afghanistan.

The results showed that WEF's dysfunction in the Global Gender Gap Index Report in Afghanistan occurred due to material factors and cultural factors. In material factors, dysfunction occurs because of WEF's weak bureaucracy and Afghanistan has stronger power than WEF. In cultural factors, dysfunction occurs due to the weakness of activities carried out by WEF in achieving gender equality in the country and differences in values and culture between WEF and Afghanistan.

Keyword: Taliban, Gender Equality, World Economic Forum, Global Gender GapIndexRepor

PENDAHULUAN

World Economic Forum (WEF) telah mengeluarkan *Global Gender Gap Report* dari tahun 2006 dan Afghanistan menjadi salah satu negara dalam laporan tersebut semenjak tahun 2021. Pada tahun 2021 – 2023, Afghanistan selalu menempati urutan terakhir yang menggambarkan bahwa ketimpangan antara perempuan dan laki-laki di negara tersebut lebih besar daripada negara lainnya.

Pada tahun 2021, Afghanistan berada di urutan 156 (indeks 0,444) dari 156 negara. Pada tahun 2022, Afghanistan berada di urutan 146 (indeks 0,435) dari 146 negara. Lalu, pada tahun 2023, Afghanistan berada di urutan 146 (indeks 0,405) dari 146 negara.¹ Indeks Afghanistan bahkan terus turun dari tahun 2021 sampai 2023.

Penambahan peraturan oleh Kelompok Taliban memperkecil ruang gerak dari perempuan Afghanistan membuat negara ini selalu berada di urutan terakhir dalam *Global Gender Gap Report* yang dikeluarkan oleh *World Economic Forum* (WEF). Besarnya *gap* antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan Masyarakat Afghanistan membuat Afghanistan mendapat nilai yang kecil di setiap tahunnya, terutama di komponen pencapaian pendidikan dan partisipasi ekonomi.

Kelompok Taliban yang memerintah Afghanistan tahun 2021 – 2023 menganut ideologi Deobandi yang konservatif dan digabung dengan adat istiadat Pashtun yang bersifat lokal. Deobandi adalah sekolah Islam yang memadukan

¹ "Global Gender Gap Report 2021-2023," World Economic Forum, Insight Report: Hal 10.

pemikiran Salafi yang ketat dan Tasawuf.

Berdasarkan ideologi tersebut, ketika berkuasa Taliban menerapkan aturan yang kontroversial. Para pemimpin Taliban menerapkan aturan kepada warga negara melalui pedoman atau rekomendasi yang menetapkan perilaku yang mereka benarkan berdasarkan interpretasi mereka atas syariah dan norma budaya yang dianggap dapat diterima oleh Taliban.² Pemerintahan Taliban mengeluarkan beberapa aturan baru dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Berdasarkan peraturan tersebut, perempuan Afghanistan dilarang untuk berpartisipasi dalam pendidikan, ekonomi, dan beraktivitas di luar rumah dengan bebas.

Pada tahun 2021 – 2023, 2,5 juta (80%) perempuan Afghanistan usia sekolah keluar dari sekolah atau tidak lagi mengikuti pendidikan formal, 1,2 juta di antaranya tidak diberi akses ke sekolah menengah dan universitas.³ Data tersebut menunjukkan adanya hambatan yang serius dalam akses pendidikan bagi perempuan di negara Afghanistan selama periode waktu tersebut. Pada kuartel keempat tahun 2022, tenaga kerja perempuan di Afghanistan

² Office of International Religious Freedom, "2022 Report on International Religious Freedom: Afghanistan," diakses pada 26 Januari 2024, https://www.state.gov/reports/2022-report-on-international-religious-freedom/afghanistan/#nav_primary-nav

³ UNESCO, "UNESCO dedicates the 2023 International Day of Education to Afghan Girls and Women," diakses pada 2 Agustus 2023 <https://www.unesco.org/en/articles/unesco-dedicates-2023-international-day-education-afghan-girls-and-women>

menurun sebesar 25%.⁴ Data ini menunjukkan data penurunan yang signifikan dalam tenaga kerja perempuan pada dua tahun pemerintahan Taliban.

Setelah pemindahan kekuasaan dari pemerintah Afghanistan ke Kelompok Taliban, Afghanistan juga dilanda dengan peningkatan krisis ekonomi. Melalui survei daring yang dilakukan oleh UN Women yang diisi oleh 127 *Non-Governmental Organization* (NGO) Nasional di Afghanistan, terdapat 79% NGO tersebut dipimpin oleh perempuan dan 47% diantaranya memiliki 70% staf perempuan.⁵ Ketimpangan antara pemerolehan hak antara perempuan dan laki-laki ini menurunkan nilai kesetaraan gender Afghanistan secara global.

Penurunan indeks dari tahun 2021 – 2023 dan makin bertambahnya peraturan yang memperkecil ruang gerak perempuan di Afghanistan membuat tujuan dari dibuatnya *Global Gender Gap Index Report* oleh WEF tidak tercapai di Afghanistan atau terjadinya disfungsi WEF mengenai pelaksanaan kesetaraan gender di negara tersebut.

KAJIAN TEORITIS

Teori Disfungsi Organisasi Internasional

Menurut Michael N. Barnett dan Martha Finnemore. Disfungsi

pada organisasi internasional terletak pada dua dimensi yakni dimensi material dan kultural, dimana dimensi tersebut bersinggungan dengan kondisi internal dan eksternal dari suatu organisasi internasional.⁶ Disfungsi organisasi internasional bisa terjadi karena faktor-faktor internal dan eksternal tersebut.

Terdapat empat hal utama yang dapat menyebabkan organisasi internasional mengalami disfungsi. Pertama, terdapat dalam sisi material dan kultural organisasi yang muncul dalam lingkungan internal dan eksternal organisasi terkait dengan politik birokratis. Kedua, disfungsi organisasi internasional terjadi karena terdapat disfungsi kultural internal organisasi dengan kultur birokratis yang dikembangkan dan dipraktekkan dalam organisasi. Ketiga, disfungsi material yang diakibatkan oleh lingkungan eksternal organisasi. Keempat, disfungsi kultural yang disebabkan oleh lingkungan eksternal organisasi.⁷ Disfungsi organisasi internasional dapat terjadi karena salah satu dari hal di atas atau bahkan keempat hal tersebut.

Dalam konteks faktor internal, disfungsi dapat timbul ketika daya pengaruh politik dalam birokrasi organisasi internasional melemah ketika dihadapkan dengan tantangan dari lingkungan eksternalnya. Birokrasi sendiri bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau motif politik tertentu, namun pada dasarnya birokrasi dalam konteks organisasi

⁴ ILO, "Women Bear Brunt of Afghanistan Job Losses," diakses pada 8 Agustus 2023 [https://www.ilo.org/asia/media-centre/news/WCMS_869891/lang-en/index.htm#:~:text=In-the-fourth-quarter-of,have-contributed-to-the-decline](https://www.ilo.org/asia/media-centre/news/WCMS_869891/lang-en/index.htm#:~:text=In%20the%20fourth%20quarter%20of,have%20contributed%20to%20the%20decline)

⁵ UN Women, "Out of Jobs, Into Poverty – The Impact of the Ban on Afghan Women Working in NGOs," 2023, Hal 3.

⁶ Michael N. Barnett dan Martha Finnemore, "The Politics, Power, and Pathologies of International Organizations," *International Organization*, Vol. 53, No.4, 1999. Hal 716.

⁷ *Ibid.*,

internasional juga memiliki kelemahan.

Pada sisi faktor eksternal, terjadinya disfungsi terlihat ketika kekuasaan negara secara signifikan mengungguli kekuasaan organisasi internasional. Organisasi internasional seringkali dihadapkan pada kebijakan negara yang bertentangan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. Meskipun demikian, hal ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan, mengingat negara-negara memiliki kewenangan tersendiri dalam menetapkan kebijakan mereka. Hal ini juga konsisten dengan pandangan bahwa tidak ada kekuatan yang dapat mengatasi kekuatan negara, terlebih lagi dengan pemahaman bahwa organisasi internasional tidak memiliki sumber daya kekuatan yang nyata.

Level Analisa: Kelompok

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan level analisis kelompok untuk menjelaskan alasan tidak tercapainya tujuan WEF dalam *Global Gender Gap Index Report* terhadap pelaksanaan kesetaraan gender di Afghanistan. Level analisis kelompok dapat dijelaskan dengan pembahasan yang melibatkan tentang peran, dinamika, dan dampak suatu kelompok dalam konteks global.

METODE PENELITIAN

Dalam menjelaskan fenomena yang ingin diselidiki, metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan variabel penelitian dengan cara eksplanatif. Pendekatan penelitian kualitatif ini berfokus pada memberikan

gambaran yang sistematis terhadap fenomena yang sedang diselidiki.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diambil secara langsung dari situs resmi aktor terkait, yaitu *World Economic Forum (WEF)*. Penelitian ini juga dilengkapi data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, yang melibatkan referensi seperti buku, jurnal, dokumen resmi, artikel, berita, sumber online, dan studi-studi sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

World Economic Forum (WEF) melalui *Global Gender Gap Report* mengalami kegagalan atau disfungsi dalam pelaksanaan kesetaraan gender di Afghanistan yang digambarkan dengan tidak dicapainya tujuan dari *Global Gender Gap Report* di negara ini. Negara Afghanistan selalu bertahan diperingkat terakhir, bahkan mengalami penurunan dari tahun ke tahun dari 2021 – 2023. Jika dibandingkan dengan indeks kesetaraan gender secara global, dalam kurun waktu tersebut Afghanistan tidak pernah mencapai atau bahkan melampaui indeksnya. Dari fakta tersebut dapat dipahami bahwa menurut *World Economic Forum (WEF)* Afghanistan menjadi negara yang gagal dalam pelaksanaan kesetaraan gender dan *Global Gender Gap Index Report* tidak dapat mencapai tujuannya di negara tersebut.

Tabel 4.1. Perbandingan Indeks Kesetaraan Gender Global Dengan Indeks Kesetaraan Gender Afghanistan Tahun 2021 – 2023

No	Tahun	Indeks Global	Indeks Afghanistan
1.	2021	0,677	0,444
2.	2022	0,681	0,435
3.	2023	0,684	0,405

Sumber: *Global Gender Gap Report 2021 – 2023*

Indeks akhir yang dikeluarkan oleh *World Economic Forum (WEF)* melalui *Global Gender Gap Report* dihitung dari empat subindeks yang terdiri dari 14 indikator. Data dari masing-masing indikator dikumpulkan dari berbagai organisasi internasional yang menyediakan data yang dibutuhkan dan berdasarkan kalkulasi WEF. Empat subindeks yang menjadi dasar indeks keseluruhan kesetaraan gender setiap negara adalah partisipasi dan kesempatan ekonomi, pencapaian pendidikan, kesehatan dan keberlangsungan hidup, dan pemberdayaan politik.

Pada *Global Gender Gap Report* yang dikeluarkan oleh *World Economic Forum (WEF)* pada tahun 2021 – 2023, WEF menyatakan bahwa subindeks yang berperan penting dalam rendahnya kesetaraan gender di Afghanistan adalah partisipasi dan kesempatan ekonomi, pencapaian pendidikan, dan pemberdayaan politik.

Pada tahun 2021 – 2023 dalam subindeks partisipasi dan kesempatan ekonomi dan pencapaian pendidikan, Afghanistan selalu berada di peringkat terakhir. Pada subindeks pemberdayaan politik, meskipun memiliki poin yang rendah, pada tahun 2021 dan 2022, Afghanistan berada di peringkat 111

dari 156 dan 107 dari 146 negara.⁸ Rendahnya indeks pemberdayaan politik tidak hanya menjadi tantangan bagi Afghanistan, namun juga menjadi tantangan secara global.

Gagalnya implementasi nilai-nilai kesetaraan gender menurut *World Economic Forum (WEF)* dalam *Global Gender Gap Report* dan pencapaian tujuan dari dikeluarkannya laporan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal. Menurut Barnett dan Finnemore (1999), disfungsi organisasi internasional dapat terjadi karena faktor material dan faktor kultural yang masing-masingnya terdiri dari internal dan eksternal organisasi internasional.⁹ Disfungsi organisasi internasional dapat terjadi karena salah satu faktor ataupun kedua faktor.

Faktor Material

Pada faktor material, organisasi internasional dihadapkan pada birokrasi materil organisasi dan konversi *power* yang berasal dari aktor lain seperti negara. Pada konversi *power* tersebut, sebuah organisasi internasional dapat mengalami disfungsi. Hal tersebut dapat terjadi karena dua hal, yaitu internal dan eksternal organisasi internasional.

Dalam organisasi internasional, disfungsi mungkin terjadi apabila kekuatan politik birokrasi internalnya lemah ketika menghadapi tekanan dari lingkungan eksternalnya. Sedangkan pada faktor eksternal, disfungsi dapat terjadi

⁸ WEF, "Global Gender Gap Report 2021 – 2022," Hal 16 – 19.

⁹ Michael N. Barnett dan Martha Finnemore, "The Politics, Power and Pathologies of International Organization," The MIT Press, 1999. Hal 716

ketika *power* negara lebih besar dibandingkan *power* organisasi internasional.¹⁰ Disfungsi organisasi internasional dapat terjadi karena salah satu faktor ataupun sekaligus keduanya.

Secara internal, disfungsi muncul saat kekuatan birokrasi politik dalam sebuah organisasi internasional lemah dalam menghadapi tantangan dari luar. Meskipun birokrasi bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau motif politik tertentu, pada kenyataannya, dalam konteks organisasi internasional, birokrasi juga memiliki kelemahan.

Pada studi kasus *World Economic Forum* (WEF) dengan Afghanistan, kepentingan WEF dihadapkan dengan kepentingan Afghanistan sebagai negara dan kelompok Taliban sebagai pemerintahan. Oleh karena itu, pada kondisi ini WEF mengikutsertakan Afghanistan dalam *Global Gender Gap Index Report* sebagai pemenuhan kepentingan dan tujuannya untuk mengukur kesenjangan gender di negara tersebut dan mendorong Afghanistan untuk membentuk kebijakan yang didasari pada *Global Gender Gap Index Report*. Apabila tujuan tersebut akhirnya tidak terpenuhi, maka WEF dikatakan mengalami disfungsi di Afghanistan.

Berhasil atau tidaknya WEF di Afghanistan tergantung dari bagaimana birokrasi politik dalam *World Economic Forum* (WEF) dalam memperjuangkan

kepentingannya. WEF memiliki visi untuk menciptakan dunia yang di dalamnya keberlanjutan, inklusivitas, dan kemajuan ekonomi dipromosikan melalui kerjasama global dan inovasi yang di dalamnya terdapat nilai-nilai untuk menyetarakan gender. *World Economic Forum* (WEF) membuat *Global Gender Gap Index Report* dengan tujuan mengukur kesenjangan gender dan mendorong negara untuk menetapkan kebijakan yang sesuai dengan konsep kesetaraan gender menurut WEF.

Salah satu kelemahan birokrasi WEF dalam mendukung berbagai kegiatan dan inisiatifnya adalah ketergantungan pada partisipasi negara dan korporasi. Apabila negara atau korporasi tidak ingin berpartisipasi dalam pelaksanaan kesetaraan gender menurut WEF, maka WEF tidak dapat memaksakan kegiatan atau inisiatif yang ingin mereka tetapkan di negara atau korporasi tersebut.

Lemahnya birokrasi *World Economic Forum* (WEF) tidak mampu mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Taliban di Afghanistan. Ditambah dengan kuatnya Taliban dalam menerapkan pemahaman Deobandi dan Pashtun secara nasional membuat Afghanistan sebagai negara tidak mau berpartisipasi dalam menerapkan nilai dan inisiatif yang ditetapkan WEF.

Pada faktor eksternal, disfungsi timbul ketika kekuatan suatu negara lebih dominan daripada kekuatan organisasi internasional.¹¹ Jika negara memiliki otoritas dalam membuat kebijakan, sehingga tidak menutup kemungkinan visi dan misi organisasi internasional tertentu tidak

¹⁰ Adeyaka Wury Aksani, "Disfungsi United Nations Population Fund (UNFPA) dalam mengatasi Gender Sex Election di Tiongkok," *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Vol 6, No 1, Januari 2017, Hal 4

¹¹ *Ibid.*, Hal 19.

sejalan dengan kebijakan yang diterapkan oleh negara. Organisasi internasional tidak bisa semena-mena mengintervensi isu dalam sebuah negara tanpa adanya konversi kekuasaan yang jelas. Konversi kekuasaan adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh negara dan organisasi internasional agar sikap yang dilakukan memiliki dampak yang legal.

Posisi *World Economic Forum (WEF)* sebagai pendatang di Afghanistan dengan kekuasaan yang berada di bawah negara membuat WEF memiliki kekuatan terbatas untuk memasukkan nilai-nilai yang dibawa tanpa adanya izin dan keinginan dari negara Afghanistan. Hal tersebut dikarenakan WEF tidak memiliki pengaruh dan kewenangan untuk memaksakan, bahkan memilih dan menetapkan kebijakan apa yang harus ditetapkan dan dihapuskan oleh Afghanistan.

Perbedaan dalam kekuasaan antara negara dan organisasi internasional menciptakan ketidaksimetrisan dalam ketergantungan yang dihasilkan oleh situasi di mana negara menjadi pemeran utama dalam menerapkan kebijakan, sementara organisasi internasional berperan sebagai pendukung dalam pencapaian kebijakan tersebut.¹² Kekuasaan negara yang lebih kuat daripada organisasi internasional dapat menimbulkan penolakan untuk menerima kebijakan, transfer ilmu, prinsip dan norma, bahkan kehadiran dari organisasi internasional di negara tersebut. Oleh karena itu, Afghanistan dapat mempertahankan nilai yang ditetapkan oleh Taliban

dan tidak harus patuh kepada WEF yang memiliki nilai berbeda.

Hal-hal di atas merupakan penyebab WEF mengalami disfungsi berdasarkan faktor material. Nilai-nilai yang dibawa oleh WEF tidak diserap oleh Afghanistan karena pemerintah Taliban memutuskan mementingkan kepentingan negaranya untuk menerapkan pemahaman Deobandi dan Pashtun dalam mengatur Agender.

Secara faktual, tidak semua negara mengikuti nilai dan norma yang diajarkan oleh organisasi internasional. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan negara untuk menentukan jalannya sendiri, terlepas dari saran yang diberikan oleh organisasi internasional.¹³ Bantuan dari organisasi internasional dapat mendukung negara dalam mencapai tujuannya, namun keputusan akhir tentang kebijakan tetap berada di tangan negara itu sendiri.

Faktor Kultural

Disfungsi yang dialami oleh suatu organisasi internasional, selain diakibatkan oleh dimensi material, disfungsi dapat disebabkan oleh dimensi kultural. Sama seperti halnya dengan dimensi material, dimensi kultural juga terdiri dari faktor faktor internal dan faktor enternal.

Pada faktor eksternal, disfungsi organisasi internasional dapat terjadi karena organisasi internasional lebih mementingkan legitimasi dibandingkan dengan efisiensi.¹⁴ Biasanya, dalam aspek ini, terdapat pembicaraan global

¹² J. Barkin Samuel. *International Organizations: Theories and Institution*. New York: Palgrave Macmillan, 2006, hal 19

¹³ Pitman B. Potter, "China and the International Legal System: Challenges of Participation, *The China Quarterly*," Volume 191, Hal 714.

¹⁴ *Ibid.*, Adeyaka Wuri Aksani, Hal 7.

yang memengaruhi cara berpikir suatu organisasi internasional, yang kemudian berdampak pada pembuatan keputusan dan kebijakan oleh organisasi internasional tersebut.

Dalam menjalankan tugasnya, organisasi internasional akan berupaya mematuhi prinsip-prinsip umum yang ditetapkan untuk mencapai kesuksesan program mereka. penerapan aturan yang umum tersebut seringkali menghasilkan kegiatan yang bersifat rutin, yang pada gilirannya dapat membuat lembaga internasional kurang responsif terhadap masalah-masalah yang timbul akibat rutinitas tersebut.¹⁵ Aturan yang digeneralisasi menyebabkan ketidakresponsifan organisasi internasional terhadap lingkungannya. Hal ini juga dapat menyebabkan organisasi terlalu fokus pada aturan yang telah ditetapkan, yang akhirnya mengarah pada perilaku yang tidak efisien dalam organisasi tersebut.

Melalui *Global Gender Gap Index Report* dapat dilihat bahwa usaha yang dilakukan WEF untuk mempersempit *gap* antara laki-laki dan perempuan hanya mengeluarkan laporan dari setiap negara tanpa adanya tindak lanjut seperti sanksi. Aktivitas tersebut tentu saja telah disesuaikan dengan standar operasi organisasi, namun memiliki dampak yang rendah terhadap negara-negara yang berada di dalamnya. Terutama negara yang memiliki kondisi budaya yang berbeda dengan WEF.

konsep dari *Global Gender Gap Report* juga menjadi salah satu

alasan WEF mengalami disfungsi terhadap pelaksanaan gender di Afghanistan. Indeks dalam *Global Gender Gap Index Report* menangkap kesenjangan berdasarkan variabel hasil, bukan variable input.¹⁶ *World Economic Forum* (WEF) menghitung indeks kesetaraan gender di suatu negara berdasarkan jumlah hasil yang kemudian dijadikan rasio untuk menentukan kesenjangan. WEF tidak mempertimbangkan kebijakan, nilai, atau pemahaman, yang ditetapkan oleh negara.

Hasil akhir dari data yang didapatkan oleh WEF menunjukkan tingginya perbedaan jumlah akhir dari laki-laki dan perempuan dalam empat bidang utama yang ditetapkan, kesempatan dan partisipasi ekonomi, pencapaian pendidikan, kesehatan dan keberlangsungan hidup, dan pemberdayaan politik, dan menjadi landasan dalam menentukan hasil akhir indeks.

Setiap tahunnya, WEF memasukkan 140-160 negara dalam *Global Gender Gap Index Report*. Setiap negara memiliki karakteristik tersendiri yang dapat dilihat melalui budaya maupun nilai yang dianut oleh masyarakatnya. Penyesuaian karakteristik wilayah dengan nilai WEF akan memudahkan organisasi tersebut untuk mencapai tujuan. Sebaliknya, nilai yang digeneralisasi memungkinkan munculnya disfungsi karena pertentangan nilai.¹⁷ Hal ini menjadi penyebab munculnya disfungsi WEF di Afghanistan.

World Economic Forum

¹⁵ Barnett, Michael N dan Martha Finnemore. *The Politics, Power and Pathologies of International Organization*. The MIT Press, 1999. Hal 718

¹⁶ World Economic Forum, "Global Gender Gap Index Report 2022," diakses pada 17 April 2024, <https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2022/>

¹⁷ Ibid., Adeyaka Wuri Aksani, Hal 11.

(*WEF*) menilai kesetaraan gender di setiap negara dengan mempromosikan tidak adanya perbedaan terhadap laki-laki dan perempuan oleh negara, terutama dalam empat bidang, yaitu partisipasi dan kesempatan ekonomi, pencapaian pendidikan, kesehatan dan keberlangsungan hidup, dan pemberdayaan politik.

Dalam *Global Gender Gap Index Report*, *WEF* mengurutkan negara dengan kesetaraan gender terbaik ke terburuk berdasarkan data output dari empat belas indikator yang menjadi dasar empat bidang tersebut. Menurut *WEF* semakin sempit *gap* antara laki-laki dan perempuan dalam partisipasi dan kesempatan ekonomi, pencapaian pendidikan, kesehatan dan keberlangsungan hidup, dan pemberdayaan politik, maka semakin bagus tingkat kesetaraan gender di negara.

Di lain sisi, pemahaman Deobandi yang dianut oleh Taliban memiliki posisi dan praktik keagamaan yang bersifat murni dan dijalankan dengan kaku. Pemahaman Deobandi mendorong Taliban untuk membentuk peraturan baru ketika kembali memerintah Afghanistan. Keadaan-keadaan yang sebelumnya dipengaruhi pemahaman barat, terutama dalam kesetaraan terhadap laki-laki dan perempuan dihapuskan.

Taliban menetapkan peraturan baru di beberapa bidang, seperti ekonomi, pendidikan, olahraga, kesehatan, dan politik. Berdasarkan pemikiran kelompok Taliban, perempuan dan laki-laki harus dibedakan dan tidak mendapatkan hak yang sama. Taliban memiliki peraturan sendiri dalam mengatur pemberian hak perempuan dan laki-laki di negaranya.

Taliban dalam pemahaman Deobandi membuat perbedaan yang tajam antara pengetahuan suci dengan pengetahuan duniawi. Sekolah yang menerapkan pemahaman Deobandi mengecualikan semua pembelajaran yang tidak Islami dan dengan tegas menolak tradisi agama lain, seperti Hinduisme dan Kristen, serta menolak pemahaman lain, seperti pemahaman Barat.

Dalam memahami penalaran Deobandi terdapat dua hal prinsip dasar yang harus dipahami, yaitu pertama, hasil suatu tindakan harus dipertimbangkan sebelum tindakan tersebut diperbolehkan. Kedua, Ruskhah (yang diperbolehkan) dan azeemah (yang terhormat).¹⁸ Dalam praktiknya, apa yang terhormat harus didahulukan daripada yang diperbolehkan.

Taliban berpegang teguh kepada dua prinsip dasar yang ada pada pemahaman Deobandi, yaitu hasil akhir dari suatu tindakan harus dipertimbangkan sebelum tindakan tersebut dapat diperbolehkan secara etis dan setiap praktik menyatakan apa yang terhormat harus didahulukan daripada yang diperbolehkan.¹⁹ Hal ini diberlakukan kepada setiap aspek kehidupan di Afghanistan.

Pendidikan bukan merupakan hal yang dilarang oleh kelompok Taliban. Akan tetapi, adanya kemungkinan pertemuan dari laki-laki dan perempuan dalam praktiknya yang hasil akhirnya dapat mengarah pada tindakan yang

¹⁸ Global Security, "Deobandi Islam: The Religion of the Taliban," diakses pada 23 Maret 2024, https://www.globalsecurity.org/military/library/report/2001/Deobandi_Islam.pdf

¹⁹ Ibid., Global Security.

dilarang, yaitu amoralitas, maka aktivitas tersebut dilarang oleh kelompok Taliban. Maka dari itu, dalam menentukan kebijakannya, kelompok Taliban sesuai dengan pemahanan Deobandi mengatur hak-hak laki-laki dan perempuan dengan berfokus kepada hasil akhir yang bisa saja terjadi dan kemudian memutuskan apakah praktik tersebut dapat diperbolehkan atau tidak.

Dalam hal ini, tujuan *World Economic Forum (WEF)* untuk membantu meningkatkan pelaksanaan kesetaraan gender di Afghanistan terhambat oleh adanya perbedaan nilai dalam pengaturan gender yang digunakan oleh WEF dengan kelompok Taliban. Taliban membuat kebijakan-kebijakan baru untuk Afghanistan dengan landasan pemisahan yang kuat antara perempuan dan laki-laki. Berbanding terbalik dengan WEF yang menginginkan kesetaraan gender berdasarkan kesetaraan rasio laki-laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan.

SIMPULAN

World Economic Forum (WEF) melalui *Global Gender Gap Index Report (GGGIR)* mengalami disfungsi dalam mencapai tujuannya mengenai kesetaraan gender di negara Afghanistan tahun 2021 – 2023. Hal ini disimpulkan dari tidak tercapainya salah satu tujuan WEF di negara tersebut untuk menjadikan GGGIR sebagai landasan dalam membuat kebijakan untuk menutup kesenjangan gender.

Disfungsi WEF dalam *Global Gender Gap Index Report* terhadap pelaksanaan kesetaraan gender di Afghanistan terjadi karena faktor material dan faktor kultural. Pada faktor material, disfungsi terjadi karena lemahnya birokrasi WEF yang masih tergantung pada

keinginan negara untuk berpartisipasi dalam mencapai tujuannya dan lebih kuatnya *power* negara membuat WEF tidak bisa semena-mena dalam memaksakan nilai yang ditetapkan organisasi.

Pada dimensi kultural, disfungsi terjadi karena cara kerja WEF yang menyamaratakan cara perhitungan setiap negara dengan fokus kepada variabel output dengan mengesampingkan semua nilai, budaya, dan kebijakan negara. Peningkatan kesetaraan gender juga diharapkan dapat terpenuhi hanya dengan mengandalkan laporan saja. Selain itu, pemahaman, nilai, dan norma yang berbanding terbalik antara WEF dengan Taliban juga menjadi salah satu alasan kuat terjadinya disfungsi.

REFERENSI

- Aksani, Adeyaka Wury. Disfungsi United Nations Population Fund (UNFPA) dalam mengatasi Gender Sex Election di Tiongkok. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Vol 6, No 1. Januari 2017.
- Barkin, J. Samuel. *International Organizations: Theories and Institution*. New York: Palgrave Macmillan, 2006.
- Barnett, Michael N dan Martha Finnemore. *The Politics, Power and Pathologies of International Organization*. The MIT Press, 1999.
- Global Security. Deobandi Islam: The Religion of the Taliban. Diakses pada 23 Maret 2024. [https://www.globalsecurity.org/military/library/report/2001/Deobandi Islam.pdf](https://www.globalsecurity.org/military/library/report/2001/Deobandi%20Islam.pdf)
- International Labour Organization. *Women Bear Brunt of Afghanistan Job Losses*. Diakses pada 8 Agustus 2023

- <https://www.ilo.org/asia/media-centre/news/>
- Office of International Religious Freedom. 2022 Report on International Religious Freedom: Afghanistan. Diakses pada 26 Januari 2024,
https://www.state.gov/reports/2022-report-on-international-religious-freedom/afghanistan/#nav_primary-nav
- Potter, Pitman B. China and the International Legal System: Challenges of Participation, *The China Quarterly*. Volume 191.
- UNESCO. UNESCO dedicates the 2023 International Day of Education to Afghan Girls and Women. Diakses pada 2 Agustus 2023
<https://www.unesco.org/en/articles/unesco-dedicates-2023-international-day-education-afghan-girls-and-women>
- World Economic Forum. *Global Gender Gap Index Report 2021*. Diakses pada 17 April 2024,
<https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2022/>
- World Economic Forum. *Global Gender Gap Index Report 2022*. Diakses pada 17 April 2024,
<https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2022/>
- World Economic Forum. *Global Gender Gap Index Report 2023*. Diakses pada 17 April 2024,
<https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2022/>